



ARSIP
KEUANGAN

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar kepada Masyarakat yang mempunyai asas manfaat tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak sesuai Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersumber dari saldo tahun sebelumnya;

b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan, maka untuk mendanai belanja dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 2

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana pada pasal 1 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun Anggaran yang berjalan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat dan Dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Selain belanja sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) beberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat ditunda pelaksanaannya termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dalam APBD tetapi secara fisik masih dalam pengerjaan.
- (2) Kegiatan – kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

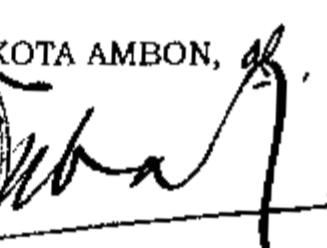
Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, dapat dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah melalui mekanisme pembahasan bersama dan dilakukan secara selektif.

Pasal 5

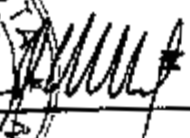
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Pebruari 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 2 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERUBAHAN PENJABARAN APBD SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN APBD
 KOTA AMBON TAHUN 2015

KATEGORI	KEGIATAN	APBD AWAL		REVISI PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG		KETERANGAN		
		Rp	Rp	Rp	Rp			
KEC TELUK AMBON	INSENTIF RT/RW	Rp	-	Rp	928.800.000	Penambahan Belanja		
		Rp	-	Rp	928.800.000			
		Rp	1.875.000.000	Rp	4.375.000.000	Penambahan Belanja		
		Rp	1.875.000.000	Rp	5.303.800.000	3.428.800.000		
PPKD	Bantuan Sosial (Kedukaan)	Rp	1.875.000.000	Rp	5.303.800.000	3.428.800.000		
		Rp	1.875.000.000	Rp	5.303.800.000			
		Rp	1.875.000.000	Rp	5.303.800.000			
		Rp	1.875.000.000	Rp	5.303.800.000			
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>								
DINAS PENDIDIKAN	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	199.791.000	Rp	532.497.000	Rp	332.706.000	Penambahan Belanja
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	1.583.280.000	Rp	2.199.270.000	Rp	615.990.000	Penambahan Belanja
	- Lomba Debat Bahasa Indonesia	Rp	-	Rp	55.491.000	Rp	55.341.000	Penambahan Belanja
	- Lomba Debat bahasa Inggris/Asing	Rp	-	Rp	55.431.000	Rp	55.341.000	Penambahan Belanja
	- Olimpiade Sains	Rp	-	Rp	88.820.000	Rp	88.820.000	Penambahan Belanja
	- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	Rp	-	Rp	164.160.000	Rp	164.160.000	Penambahan Belanja
	- Cerdas Cermat 4 Pilar	Rp	-	Rp	68.808.000	Rp	68.808.000	Penambahan Belanja
		Rp	1.783.071.000	Rp	3.164.417.000	Rp	1.381.166.000	
		Rp	60.000.000	Rp	250.010.000	Rp	190.010.000	Penambahan Belanja
		Rp	60.000.000	Rp	250.010.000	Rp	190.010.000	
DINAS KESEHATAN	- Pendampingan Tenaga Kesehatan	Rp	-	Rp	227.476.000	Rp	227.476.000	Penambahan Belanja
		Rp	-	Rp	14.638.484.365	Rp	620.631.560	Penambahan Belanja
		Rp	14.017.852.805	Rp	171.310.000	Rp	171.310.000	Penambahan Belanja
		Rp	-	Rp	179.370.000	Rp	179.370.000	Penambahan Belanja
DINAS PU	- Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Rp	-	Rp	15.216.640.365	Rp	1.198.787.560	Penambahan Belanja
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp	-	Rp	1.198.924.700	Rp	688.790.800	Penambahan Belanja
	- Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal, Mr. Saar Soparua (Wainitu)	Rp	-	Rp	7.380.341.000	Rp	158.894.000	saldo 2014
	- Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Templat Parkiran Pemerintah Kota Ambon	Rp	-	Rp	3.097.485.000	Rp	406.303.000	saldo 2014
		Rp	14.017.852.805	Rp	2.342.027.730	Rp	130.681.495	saldo 2014
		Rp	-	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	saldo 2014
		Rp	510.133.900	Rp	11.152.900	Rp	11.152.900	saldo 2014
		Rp	7.121.447.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	saldo 2014
		Rp	2.681.182.000	Rp	-	Rp	-	
		Rp	2.211.346.235	Rp	-	Rp	-	
DINAS TATA KOTA	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan APEKSI	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Penambahan Belanja
	- Pembi. Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	- Pembangunan Talud Penahan Tanah	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	- Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	- Pemataan Lahan Relokasi Batu Gajah	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	- Pembangunan Pasar Apung Mardika (Tahap I)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
- Pembangunan Pos Jaga Pasar Mardika	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
- Pembangunan Pelataran Parkir Gedung D	Rp	-	Rp	-	Rp	-		

	KEGIATAN	APRO AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERURUTAN	KETERANGAN
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemukiman	Rp 814.394.000	Rp 1.085.268.000	Rp 270.874.000	saldo 2014
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Rp	Rp 461.211.500	Rp 461.211.500	saldo 2014
	- Revitalisasi Pasar Apung Mardika (Tahap II)	Rp	Rp 875.972.700	Rp 875.972.700	saldo 2014
	- Pembangunan Gedung Kantor (Bantuan Propinsi)	Rp	Rp 1.130.000.000	Rp 1.130.000.000	Penambahan Belanja
	- Pembangunan Gedung Kantor	Rp 1.956.059.696	Rp 2.957.906.696	Rp 1.001.847.000	saldo 2014
		Rp 15.364.562.831	Rp 20.467.290.226	Rp 5.162.727.395	
	- Promosi Pembangunan Daerah	Rp	Rp 462.520.945	Rp 462.520.945	Penambahan Belanja
	- Survey Pengaruh pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Kemiskinan di Kota Ambon	Rp	Rp 311.816.225	Rp 311.816.225	Penambahan Belanja
	- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015	Rp	Rp 356.891.445	Rp 356.891.445	Penambahan Belanja
	- Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan	Rp	Rp 349.995.510	Rp 349.995.510	Penambahan Belanja
		Rp	Rp 1.481.224.125	Rp 1.481.224.125	
	- Rehabilitasi Berat Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Pembuatan Fasilitas Areal Perparkiran	Rp 765.959.000	Rp 765.959.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Apeksi	Rp 500.000.000	Rp 900.000.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Pembangunan Terminal Petikemas	Rp 3.500.000.000	Rp 5.500.000.000	Rp 2.000.000.000	Penambahan Belanja
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas (UPR)	Rp 399.955.000	Rp 899.955.000	Rp 500.000.000	Penambahan Belanja
	- Pembangunan Halte Ojek	Rp	Rp 188.400.000	Rp 188.400.000	Penambahan Belanja
	- Pemertiban Terpadu TNI/POLRI dan PEMKOT	Rp 600.000.000	Rp 1.800.000.000	Rp 1.200.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 8.265.914.000	Rp 12.154.314.000	Rp 3.888.400.000	
	- Pergadaan Taman kota	Rp	Rp 20.250.000	Rp 20.250.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Alat Berat	Rp	Rp 970.000.000	Rp 970.000.000	Penambahan Belanja
	- Rehab Bak Sampah	Rp	Rp 195.925.500	Rp 195.925.500	Penambahan Belanja
	- Pembuatan Taman Bunga	Rp	Rp 190.000.000	Rp 195.925.500	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Mesin Potong Rumpuk	Rp 21.000.000	Rp 52.500.000	Rp 31.500.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 488.000.000	Rp 2.183.000.000	Rp 1.695.000.000	Penambahan Belanja
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 8.142.995.000	Rp 10.428.375.000	Rp 2.285.380.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Peralatan Kebersihan	Rp 134.473.000	Rp 192.424.000	Rp 57.951.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan RTH	Rp 6.980.725.050	Rp 8.135.866.650	Rp 1.155.141.600	Penambahan Belanja
	- Kerja Extra Peningkatan Persampahan	Rp 89.640.000	Rp 175.440.000	Rp 85.800.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Tempat Pemukiman Sampah	Rp 498.512.500	Rp 1.084.022.500	Rp 585.510.000	Penambahan Belanja
	- Penyediaan Tempat Pemukiman Sampah	Rp 122.500.000	Rp 547.500.000	Rp 425.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 16.477.845.550	Rp 24.175.303.650	Rp 7.703.458.100	
	- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Rp	Rp 102.859.500	Rp 102.859.500	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Badan Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)	Rp	Rp 82.172.980	Rp 82.172.980	Penambahan Belanja
	- Penyusunan Pelaporan Status Lingkungan Hidup (SLDH) Kota Ambon	Rp	Rp 186.710.500	Rp 186.710.500	Penambahan Belanja
	- Koordinasi Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kota	Rp	Rp 197.397.000	Rp 197.397.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Dampak Perubahan Iklim	Rp 100.000.000	Rp 252.310.200	Rp 152.310.200	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perampahan-Bank Sampah (DAK)	Rp	Rp 47.026.000	Rp 47.026.000	Penambahan Belanja
		Rp	Rp	Rp	

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN	APBD AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKANG	KETERANGAN
- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penampungan Sampah 4(Empok) Jenis	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
	Rp	199.750.000	199.750.000	968.226.180
KANTOR SAT POL PP	Rp	100.000.000	1.068.226.180	280.612.500
- Pengamanan Kegiatan APEKSI	Rp		280.612.500	280.612.500
SEKRETARIAT KOTA	Rp			198.000.000
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PMS	Rp		198.000.000	198.000.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	148.330.000	368.340.000	220.010.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	2.999.400.000	4.026.000.000	1.026.600.000
- Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp	2.573.440.000	5.991.570.000	3.418.130.000
- Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan dan Propaganda	Rp	2.499.988.950	3.249.988.950	750.000.000
	Rp	8.221.158.950	13.833.898.950	5.612.740.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Rp	299.138.000	544.335.790	245.197.790
- Sosialisasi Kambiyas/Forkopindo	Rp	145.311.500	328.839.540	183.528.040
- Penanganan Keamanan Dalam Negeri	Rp		199.003.500	199.003.500
- Rapat Koordinasi Revisi Perda No 03 dan 13 Tahun 2008	Rp	1.456.528.120	2.086.728.120	690.200.000
- Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	1.900.977.620	3.158.906.950	1.257.929.330
	Rp		99.400.000	99.400.000
BAGIAN EKONOMI	Rp		99.400.000	99.400.000
- Rekrutas APEKSI Tahun 2015	Rp		99.400.000	99.400.000
BAGIAN HUMAS	Rp	399.875.000	960.960.000	561.085.000
- Kegiatan APEKSI	Rp	399.875.000	960.960.000	561.085.000
BAGIAN URUM & PERLENGKAPAN	Rp	4.079.972.000	5.504.256.250	1.524.284.250
- Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Rp	487.400.000	946.800.000	459.400.000
- Kunjungan Kerja/Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp	910.844.100	1.598.649.100	685.805.000
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Rp	722.965.062	958.505.062	235.540.000
- Pengadaan Peralengkapan Rumah Jabatan /Dinas	Rp	322.006.031	402.906.031	80.900.000
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp	385.834.062	755.369.062	369.555.000
- Pengadaan Perengkapan gedung kantor	Rp	543.999.860	804.499.860	260.500.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp	7.342.000.000	7.454.000.000	112.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	742.776.795	1.244.026.795	501.250.000
- Penyelenggaraan APEKSI	Rp	15.537.777.910	19.767.012.160	4.229.234.250
BPKK	Rp	135.244.000	225.023.000.00	89.779.000
- Penyediaan Alat Tulis kantor	Rp	25.000.000	85.357.500	60.357.500
- Pengadaan Alat-Alat Kebersihan dan Pembersih Gedung kantor	Rp		131.308.000	131.308.000
- Pengadaan dan Pemasangan Aplikasi SIM Gaji	Rp		150.065.434	150.065.434
- Asistensi dan Pengkajian laporan Keuangan SKPD	Rp		358.780.563	358.780.563
- Asistensi dan Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan	Rp		196.950.000	196.950.000
- Pembuatan Sekat Ruang Kerja Kantor BPKK	Rp		95.522.489	95.522.489
- Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Keuangan Daerah	Rp		249.987.750	249.987.750
- Training Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	450.000.000	500.000.000	50.000.000
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan APB Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Kota Ambor.	Rp			

	KETERANGAN	LENGKAP AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Rp 75.517.250	Rp 175.517.250	Rp 100.000.000	Penambahan Belanja
	Penyusunan Peraturan KDH Tentang Pergeseran Anggaran	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
	Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD	-	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Penambahan Belanja
	Penyusunan Profil dan Pengembangan WEBSITE BPKK	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
	Pejempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 685.761.250	Rp 2.818.531.986	Rp 2.132.770.736	
INSPEKTORAT KOTA	Sosialisasi Pengawasan Laporan Keuangan	Rp -	Rp 217.998.300	Rp 217.998.300	Penambahan Belanja
		Rp -	Rp 217.998.300	Rp 217.998.300	
KANTOR PENGELOLAAN ASET	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kota Ambon	-	Rp 297.787.500	Rp 297.787.500	Penambahan Belanja
	Kegiatan Manajemen Aset Pemerintah Kota Ambon	-	Rp 237.400.000	Rp 237.400.000	Penambahan Belanja
	Kegiatan Penginputan Data Aset Pemerintah Kota Ambon	-	Rp 266.327.037	Rp 266.327.037	Penambahan Belanja
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan aset Daerah	-	Rp 144.542.324	Rp 144.542.324	Penambahan Belanja
		Rp -	Rp 946.056.861	Rp 946.056.861	
KPDE	Rapat Kerja Apeksi Tahun 2015	Rp 9.000.000	Rp 49.467.000	Rp 40.467.000	Penambahan Belanja
		Rp 9.000.000	Rp 49.467.000	Rp 40.467.000	
DINAS PARAWISATA	City Tour Peserta APEKSI	-	Rp 57.805.500	Rp 57.805.500	Penambahan Belanja
	Parade Budaya Peserta APEKSI	-	Rp 116.690.300	Rp 116.690.300	Penambahan Belanja
	Launching Program Mangerte Ambon	Rp 65.000.000	Rp 578.270.820	Rp 513.270.820	Penambahan Belanja
		Rp 65.000.000	Rp 424.495.000	Rp 687.766.820	
BPPMD	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Desa	Rp -	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Penambahan Belanja
		Rp -	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	
DIPERINDAG	Pameran Apeksi Tahun 2015	Rp 101.613.250	Rp 168.894.750	Rp 67.281.500	Penambahan Belanja
	Pasar Murah Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah	Rp -	Rp 83.922.000	Rp 83.922.000	Penambahan Belanja
	Pengadaan Sarana Penunjang dan Urugan Tanah Pasar Terminal Transit Passo (Pasar I dan Pasar II)	Rp -	Rp 159.270.000	Rp 159.270.000	Penambahan Belanja
	Pengadaan Komputer Gedung UPTD Metrologi	Rp -	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	Penambahan Belanja
	Pengadaan Perengkapan kantor Gedung UPTD Metrologi	Rp -	Rp 22.250.000	Rp 22.250.000	Penambahan Belanja
	Pengadaan Meubelair Gedung UPTD Metrologi	Rp -	Rp 29.480.000	Rp 29.480.000	Penambahan Belanja
	Pengadaan Etalase Bagi Penjual Ikan Asap	Rp -	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	Penambahan Belanja
	Monitoring, Pengawasan, dan Evaluasi Penzinan	Rp -	Rp 19.951.300	Rp 19.951.300	Penambahan Belanja
	Pengadaan Tenda Pedagang	Rp 249.400.250	Rp -	Rp (249.400.250)	Pergeseran Belanja
	Pembangunan Kios Pedagang di Kecamatan Taluk Ambon	Rp -	Rp 249.400.250	Rp 249.400.250	Pergeseran Belanja
		Rp 351.013.500	Rp 775.768.300	Rp 424.754.800	

KEGIATAN	RP/TA 2014		RP/TA 2015		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	AWAL	BERUBAH	
BKKB	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK)	Rp 350.000.000	Rp 425.000.000	Rp 75.000.000	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan BKB KIT (DAK)	Rp 250.000.000	Rp 164.000.000	Rp (86.000.000)	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan PLKB KIT (Dak)	Rp 150.000.000	Rp 164.062.500	Rp 14.062.500	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan KIE KIT (DAK)	Rp -	Rp 134.968.636	Rp 134.968.636	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan Mobil/Angkutan Alat Obat Kontrasepsi (DAK)	Rp 400.000.000	Rp 255.681.614	Rp (144.318.386)	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan Kendaraan Angkutan Peserta KB (DAK 2014)	Rp -	Rp 475.200.000	Rp 475.200.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Tanah Untuk Balai Penyuluhan KB	Rp 1.150.000.000	Rp 1.933.912.750	Rp 783.912.750	Penambahan Belanja
PERTANIAN	- Penyediaan Tumbuhan Pengganggu	Rp -	Rp 195.588.800	Rp 195.588.800	Penambahan Belanja
		Rp -	Rp 195.588.800	Rp 195.588.800	
Jumlah Belanja Langsung					
	Rp 84.229.810.416	Rp 123.515.096.103	Rp 39.285.285.687	Rp 39.285.285.687	
JUMLAH RENCANA PERUBAHAN BELANJA					
	Rp 86.104.810.416	Rp 128.818.896.103	Rp 42.708.085.687	Rp 42.708.085.687	


 WAKIL BUPATI AMBON
 RICHARD LOUHENAPESY